



**PENGARUH PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**Oleh:**

**NOVA SRI WAHYUNI**  
**NIM. 1730402058**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021/1442 H**

## LEMBAR PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur ku persembahkan kepadaMu Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta atas karunia dan rahmat serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita untuk membanggakan kedua orang tua dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Ku persembahkan karya kecil ini untuk orang yang paling aku sayangi setelah Allah dan Rasulnya...

Untuk Ayah (**Fauzi**) dan Ibunda (**Zelni**)

Skripsi ini adalah persembahan kecilku untuk kedua orangtuaku. Tak cukup dengan lembaran kertas putih ini ku ungkapkan untaian rasa syukur karena telah dilahirkan dari keluarga yang membuatku selalu bersyukur berada didalamnya. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada kepada ayahanda yang telah mendidikku hingga menjadi pribadi yang sekuat ini dan bidadari tak bersayapku yang selalu memberikan senyuman dan dekapannya, selalu memberikanku semangat di setiap langkah yang ku ambil dan tanpa lelah mendoa kanku hingga aku bisa melangkah sejauh ini. D'okan anakmu bisa menggapai cita-cita dan bisa membanggakan keluarga dan berguna bagi lingkungan sekitar, Amiiinn.

Untuk kakak dan adikku

Terima kasih banyak kepada saudara sedarahku, untuk kakak **Zailatul Fauziah**, terimakasih banyak telah membuatku menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi baik itu moril maupun materil, dan juga untuk **Rani Fitriza** terimakasih banyak telah telah sabar dalam membatuku.

Terimakasih ku ucapkan untuk teman perjuangan dari kecil **Dilla Hativa** yang selalu siap untuk membantuku dalam proses penyelesaian skripsi ini serta selalu memberikan motivasi dan dukungannya.

*Terimakasih kepada keluarga besarku yang selalu mendukung dalam proses Panjang perjuangan ini terimakasih:*

*Ilyas (Yahwo), Hasna (Nenek), Delfi (etek), Refnitius (etek), Wildahayati (etek), Asrul (Makdang), Hendra (Maketek)*

*Terimakasih ku ucapkan untuk teman-teman yang telah melangkah Bersama dari awal sampai akhir dari masa perkuliahan ini Perawati, Tania Zaharatul Baiti, Aulia Ikhwani, Nefriza Susanti, Mulia Rahmi dan Wina Devida Nofitri. Jangan pernah berubah walaupun pada akhirnya kita sibuk pada dunia masing-masing.*

*Terimakasihku kepada teman-teman Squad Girls yang memberikan pelangi di semester akhir ini: Tina Regina Sari, Rais Arza Septriani, Meri Indriyani, Misra Yeni, Papuan Sari, Trisa Darma, dan Widia Siska.*

*Kepada teman-teman seperjuangan Sarjan Ekonomi Syariah, terimakasih telah kebersamai dalam proses perjuangan menuju S.E ini: Setri Reza Artamevia, Mulia Rahmad Hidayat, Rafi Fernandes, Azka Nofendra, Muhammad Fadhlil, Yoga Fernando, Ryanda Pratama, Yollanda, Silvia Eka Putri dan Rosa Faulina...*

*Untuk Yang Mengeluh Soal Skripsi*

*Percayalah teman-temanku ini bukan lah persoalan siapa yang cepat selesai ataupun tidak, tetapi ini cuma masalah waktu saja, intinya tetap semangat dan jangan sampai berhenti bergerak, karena berhenti sama saja memperlambat langkah menuju gerbang kampus.*

*Semangat dan kita pasti bisa mencapai kesuksesan*

## BIODATA



Nama : Nova Sri Wahyuni  
Bp/Nim : 2017/1730402058  
Tempat/Tanggal Lahir : Simabur 27 Juli 1997  
Alamat : Nagari Batu – Basa, Kecamatan Pariangan,  
Kabupaten Tanah Datar  
No Hp/Tel : 085363847901  
Pendidikan : SMA  
Nama Orang Tua  
Ayah : Fauzi  
Ibu : Zelni  
Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Petani  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Nagari Batu – Basa, Kecamatan Pariangan,  
Kabupaten Tanah Datar  
Wisuda Periode : 50  
Riwayat Pendidikan : SD N 10 Batu Basa  
SMP N 3 Pariangan  
SMA N 1 Pariangan  
Riwayat Organisasi : Kepala Bidang Budi Pekerti Luhur OSIS SMA N  
Pariangan  
Bendahara Umum HMJ Ekonomi Syariah  
Periode 2019  
Anggota HMI Cabang Batusangkar

Batusangkar, 20 Agustus 2021

(Nova Sri Wahyuni)

## PERSETUJUAN PEMBIBING

Pembibing Skripsi atas nama **NOVA SRI WAHYUNI, NIM 1730402058** dengan judul “**PENGARUH PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Juli 2021

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Pembimbing**



**Gampito, SE., M.Si**  
**NIP.19670219 200501 1 005**

**Muhammad Deni Putra, M.E**  
**NIP.199106102019031014**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar

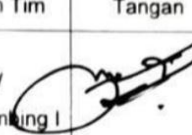
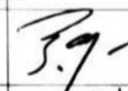
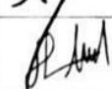


**Dr. Rizal, M.Ag.CRP®**  
**NIP.19731007 200212 1001**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Nova Sri Wahyuni, NIM. 1730402058, Judul **PENGARUH PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Muhammad Deni Putra, M.E NIP. 19910610 201903 1 014	Ketua Sidang/ Pembimbing I		19/8/2021
2	Gampito, SE., M.Si NIP. 19670219 200501 1 005	Penguji I		19/8/2021
3	Febria Rahim, ME -	Penguji II		19/8-2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



**Dr/Rizal, M.Ag.CRP®**  
NIP/19731007 200212 1001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Sri Wahyuni

NIM : 1730402058

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PENGARUH PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



**Nova Sri Wahyuni**  
NIM 1730402058

## ABSTRAK

**Nova Sri Wahyuni. NIM 1730402058 (2021).** Judul Skripsi: “**Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Program Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Masalah dalam penelitian ini adalah penerimaan daerah di Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu dana transferan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 84% dan Pendapatan Asli Daerah hanya 11% pada tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PDRB, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar, dan apakah PDRB, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar secara simultan, serta tinjauannya dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam periode 2010-2019. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mengumpulkan langsung dari instansi terkait yaitu BPS Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Tanah Datar, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar berupa pajak dan retribusi daerah ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam telah sesuai dengan Ekonomi Islam yang mana telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 29.

**Kata kunci:** PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Segala penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PENGARUH PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dengan ikhlas membantu penulis dari awal hingga terselesainya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua (Ayah Fauzi dan Ibu Zelni) yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materil. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang tulus pada setiap langkah penulis.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Marjoni Imamora, M.Sc Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Bapak Rizal, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Bapak Gampito, SE., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan.
4. Bapak Widi Nopiardo, M.A Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta bimbingan selama penulis kuliah sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Deni Putra, M.E Selaku Pembimbing Penulis yang penuh kesabaran dan bijaksana meluangkan waktu dan tenaganya memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada penulis hingga penulis mampu untuk memahaminya dalam kelangsungan karya ilmiah ini.
6. Kepala perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi IAN Batusangkar khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh karyawan BPS Kabupaten Tanah Datar selaku pemberi informasi kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh sahabat penulis sejak kecil yang telah banyak membantu memberikan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2017 khususnya teman-teman lokal Ekonomi Syariah B yang selalu menjadi penyemangat dan tim sukses yang selalu menemani, mendukung, dan memberikan motivasi dari awal kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman organisasi HMJ Ekonomi Syariah 2019 dan HMI Cabang Batusangkar. Terimakasih telah berjuang Bersama dalam meningkatkan potensi diri dan telah memberikan semangat serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada senior dan orang terdekat yang telah membantu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Batusangkar, 12 Juli 2021

Penulis.



**NOVA SRI WAHYUNI**  
**NIM. 1730402058**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	10
G. Defenisi Operasional .....	11
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Konsep Pendapatan Asli Daerah .....	13
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	13
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	14
c. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	21
2. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	24

	a. Pengertian PDRB .....	24
	b. Metode Perhitungan PDRB .....	26
	c. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah....	28
	3. Konsep Pengeluaran Pemerintah .....	29
	a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	29
	b. Teori Pengeluaran Pemerintah .....	30
	c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	32
	B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	34
	C. Kerangka Pikir .....	37
	D. Hipotesis .....	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
	A. Jenis Penelitian .....	41
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
	C. Populasi dan Sampel .....	42
	D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	43
	E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
	A. Temuan Penelitian .....	49
	1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar .....	49
	2. Sarana Prasarana Kabupaten Tanah Datar .....	52
	B. Hasil Penelitian .....	55
	1. Uji Asumsi Klasik .....	55
	2. Uji Koefisien Determinasi .....	58
	3. Uji Regresi Linier Berganda .....	59
	4. Uji Hipotesis .....	60
	C. Pembahasan Penelitian .....	62
	1. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah ....	62

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah ..... 63
3. Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2019 secara simultan.....64
4. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Ekonomi Islam ..... 64

**BAB V        PENUTUP.....67**

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran ..... 67

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan PAD Kabupaten Tanah Datar ...	3
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	4
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian .....	42
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Tanah Datar .....	50
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan .....	52
Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.....	53
Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.....	54
Tabel 4.5 Uji Normalitas One Sample Kolmogorof-Smirnov .....	55
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas Tolerance dan VIF Coeficients .....	56
Tabel 4.7 Kriteria Uji Autokorelasi .....	57
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Model Summary .....	57
Tabel 4.9 Model Summary.....	58
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linier Berganda .....	59
Tabel 4.11 Uji Sigifikansi Parsial Tolerance dan VIF Coeficients.....	61
Tabel 4.12 Uji F untuk PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	62
Tabel 5.1 Realisasi Pajak Daerah.....	65
Tabel 5.2 Realisasi Retribusi Daerah .....	65

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....	32
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tanah Datar.....	51
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupannya. (Ali, 2009: 30)

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia. Namun dalam perjalanannya dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi dan kompleks. Bagi Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan. Namun upaya untuk mengatasi persoalan pembangunan harus terus dilakukan. Pemerintah Bersama DPR harus terus berupaya menyusun kebijakan nasional untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. (Achmad Sani Alhusain, 2018: 1)

Pembangunan ekonomi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta kontribusi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu memperkirakan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Tumangkeng, 2018: 128)

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (Achmad Sani Alhusain, 2018: 2)

Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Jika dilihat kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab. (Udin, 2012: 105)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli yang berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah

menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. (Handayani, 2019: 130)

Setiap daerah berlomba-lomba untuk dapat bisa meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk didalamnya meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak juga sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Barat yang mana memiliki potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar belum dalam dapat dikatakan mandiri. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi penerimaan daerah Kabupaten Tanah Datar 2010-2019:

**Tabel 1.1**  
**Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD Kabupaten Tanah Datar**  
**(Dalam Rupiah)**  
**T.A 2010 sampai T.A 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah</b>	<b>PDRB</b>	<b>PAD</b>
2015	1.103.712.730.000	7.955.069	112.072.727.000
2016	1.249.495.599.000	8.355.071	118.971.144.000
2017	1.218.833.756.000	8.782.098	129.271.309.000
2018	1.273.477.068.000	9.227.057	115.914.187.000
2019	1.350.362.907.000	9.689.706	129.785.828.000

Sumber: Data diolah BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan, yang mana artinya dengan peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan mengurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya peningkatan pengeluaran tersebut dapat mempertinggi kegiatan ekonomi. Jadi dengan meningkatnya

kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat. Kemudian PDRB Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Dengan peningkatan PDRB tersebut akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar hal ini dapat dilihat dari data tabel yaitu pada tahun 2015-2017. Namun berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015-2017 bahwa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak membuat Kabupaten tersebut menjadi daerah yang mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya, hal ini didukung oleh data dimana daerah Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh dana yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**(Dalam Rupiah)**  
**T.A 2010 sampai T.A 2019**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Dana Perimbangan (Rp)</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)</b>
2015	112.072.727.000	766.634.111.000	273.191.429.000
2016	118.971.144.000	1.069.269.282.000	7.253.370.000
2017	129.271.309.000	1.041.225.556.000	10.521.848.000
2018	115.914.187.000	1.069.760.769.000	44.661.064.000
2019	129.785.828.000	984.486.274.000	52.786.501.000

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa meningkatnya pendapatan asli daerah 3 tahun terakhir yaitu 2015-2017 tidak membuat Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah yang mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya. Hal ini dikarenakan masih dominannya peran dana perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu pembangunan ekonomi daerah. Tercatat pada tahun 2015 kontribusi penerimaan daerah Kabupaten Tanah Datar di dominasi oleh dana perimbangan yaitu sebesar 67%, lalu

pendapatan asli daerah sebesar 10% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23%. Pada tahun 2019 kontribusi Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 11%, tetapi penerimaan dana perimbangan masih paling yang tertinggi dari dana yang lain yaitu sebesar 84% dan lain-lain pendapatan yang sahnya turun yaitu menjadi 5%.

Kecilnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menyumbang kepada penerimaan daerah menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Tanah Datar belum bisa memberikan kontribusi secara signifikan atau menyeluruh terhadap APBD. Dengan demikian, maka perlu dicari potensi-potensi daerah untuk meningkatkan PAD dari Pajak, Retribusi, Laba BUMD maupun lain-lain PAD yang sah.

Simanjuntak (dalam Halim, 2001: 101) beliau mengemukakan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD.

Variabel yang dapat dikendalikan yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dan variabel ini tidak menyediakan data berupa angka sehingga ketika dipakai dalam sebuah penelitian tidak dapat diukur secara objektif pengaruhnya terhadap penerimaan PAD. Namun variabel ini digunakan sebagai variabel pengontrol akan kesuksesan peningkatan PAD suatu daerah. Selain dari variabel yang dikendalikan, juga terdapat variabel yang tidak dapat dikendalikan. Untuk menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai dengan menggunakan variabel yang tidak dapat dikendalikan yaitu seperti variabel-variabel makro ekonomi yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah antara lain seperti, perkembangan PDRB perkapita riil, jumlah penduduk dan inflasi. (Kuntari, 2007: 3)

Disisi lain pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini menghasilkan produk-produk yang bisa meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Proses dari pertumbuhan ekonomi ini dalam masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat akan meningkatkan pendapatan yang pada dasarnya bisa meningkatkan konsumsi sehingga akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan daerah lainnya. (Zein, 2018: 2)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu Konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah). PDRB merupakan salah satu ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. PDRB juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. (Sembiring, 2019: 84) Sedangkan Pengeluaran pemerintah mencerminkan suatu kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah juga dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. (Prasetya, 2012: 5)

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam. (Almizan, 2016). Menurut pandangan Islam pada zaman nabi Muhammad SAW menetapkan kebijakan yang dapat di implikasikan melalui sejarah perjalanan dari Mekah ke Madinah (hijrah) dan mempersuadarkan penduduk asli Madinah dengan imigran yang mendampingi nabi SAW. Implikasi dari kedua kebijakan ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi awal pemerintah Madinah mulai mengalami perubahan dalam keuangan dan pembangunannya walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. (Djumadi, 2016: 8)

Pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam Islam adalah proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata Susila dalam kehidupan. Dalam pengertian ini, Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan materil di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya dalam Islam menyatu secara integral dan saling mempengaruhi. (Almizan, 2016: 207)

Dana yang direalisasikan untuk pembangunan bersumber dari penerimaan pemerintah atau keuangan publik. Dalam pemerataan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan Islam menekankan dana yang bersumber pada penerimaan negara harus dikelola dengan optimal. Apabila tidak optimalnya akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah yang akan digunakan sebagai pembangunan bagi daerah.

Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiziyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Dari penjelasan ayat diatas bahwa manusia diperintahkan oleh Allah membayar *jiziyah* dengan patuh, karena ini berkaitan untuk pengoptimalan keuangan daerah. Kondisi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, apabila penerapan tujuan yang tidak sesuai akan mengakibatkan anggaran pendapatan daerah yang di dapatkan tidak mencukupi dikhawatirkan terjadinya pendistribusian yang tidak merata, dalam Islam itu dilarang karena munculnya ketidakadilan.

Berdasarkan fenomena dan fakta yang terdapat dalam latar belakang diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk membahas secara statistik apakah terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka penulis mengambil judul dari penelitian ini yaitu: **“Pengaruh PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah:

1. PDRB tidak memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pengeluaran Pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar
3. Penerimaan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Dominasi oleh Dana Perimbangan.
4. Pendapatan Asli Tanah Datar mengalami befluktuasi pada tahun 2018.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2019.
2. Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2019.
3. PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2019.
4. Meninjau dari sudut pandang ekonomi Islam atas PDRB dan Pengeluaran pemerintah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2019.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019?
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019?
3. Bagaimana Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019 secara simultan?
4. Bagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019 dalam perspektif ekonomi Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019?
- b. Untuk mengetahui apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019?
- c. Untuk mengetahui apakah PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019 secara simultan?
- d. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019 dalam perspektif ekonomi Islam?

## **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang ekonomi makro, melalui penerapan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

#### **b. Bagi Akademik**

Penelitian ini semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang ekonomi makro.

#### **c. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bagi pemerintah agar dapat melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat mendanai pembangunan ekonomi daerah secara mandiri dan terus mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan penerimaan daerah di kabupaten Tanah Datar.

## **2. Luaran Penelitian**

Luaran penelitian dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

## **G. Defenisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independent.

1. Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan daya ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang di wilayah itu. PDRB yang digunakan di dalam penelitian ini adalah PDRB atas harga konstan yang dinyatakan dalam satuan rupiah, dimana dengan digunakan PDRB harga konstan ini dapat menunjukkan laju Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi wilayah. PDRB yang digunakan yaitu PDRB dari tahun 2010-2019.
3. Pengeluaran Pemerintah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini meliputi konsumsi dan investasi. Pengeluaran Pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu total realisasi belanja daerah yang digunakan dan dinyatakan dalam rupiah. Pengeluaran Pemerintah yang digunakan yaitu dari tahun 2010-2019.

4. Pendapatan Asli Daerah merupakan keseluruhan penerimaan daerah yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD yang digunakan dalam penelitian ini yaitu total dari keseluruhan penerimaan daerah seperti Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD yang digunakan yaitu PAD pada tahun 2010-2019 yang dinyatakan dalam rupiah. Untuk melihat peranan Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam penulis menggunakan data dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2010-2019.
5. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang menerapkan prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap ekonomi yang dilakukan seperti menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. (Maharani, 2018)

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan suatu daerah telah diatur dalam pasal 285 Ayat 1 UU Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu dari Pendapatan daerah yang mana dengan adanya aturan tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna untuk mengurangi ketergantungan ke pemerintah pusat. Hal ini juga berdampak kepada penguatan otonomi dan keleluasaan daerah. (Kamal, 2019: 22)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah yaitu suatu pendapatan yang berasal dan bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi. (Yani, 2013: 65)

Menurut Halim (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor

pendapatan daerah ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu daerah, hal ini dikarenakan melalui sektor ini daerah dapat melihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. (Iryanie, 2018: 23)

Jadi Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari daerah dan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sumber pendapatan daerah ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

## **b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **1) Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan asli daerah, yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar bagi setiap warga negara sebagai bentuk pengabdian kepada negara yang bermanfaat secara tak langsung. Pajak daerah merupakan sumber terbesar pendapatan suatu daerah dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Pemungutan pajak atas objek pajak, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

#### **a) Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi**

Pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi merupakan kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi dan undang-undang yang berlaku. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- 1) **Pajak Kendaraan Bermotor**, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor.
  - 2) **Pajak balik nama kendaraan bermotor**, Pajak balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
  - 3) **Pajak bahan bakar kendaraan bermotor**, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - 4) **Pajak Air Permukaan**, Pajak Air Permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah air air yang ada pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
  - 5) **Pajak rokok**, Pajak rokok merupakan pajak yang dipungut atas bea cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. (Iryanie, 2018: 60)
- b) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota**

Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, objek pajak yang dipungut kabupaten/kota ini lebih luas cakupannya dibandingkan pajak provinsi, karena objek pajak Kabupaten/Kota bisa diperluas berdasarkan peraturan pemerintah jika tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;

- 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan;
  - 11) Pajak Perolehan hak atas Tanah dan bangunan.
- (Setiawan, 2018: 175)

## **2) Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek dari retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

### **a) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum sehingga dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Penggolongan retribusi jasa umum, digunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jasa yang termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Jasa untuk kepentingan umum, memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.

- 3) Dianggap layak apabila jasa diberikan kepada pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- 4) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan jasa dimaksud.
- 5) Dipungut secara efektif dan efisien sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- 6) Pelayanan dalam penyediaan jasa diberikan dalam tingkat kualitas pelayanan yang memadai.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pelayanan kebersihan;
- 3) Penggantian biaya cetak kartu penduduk, akta catatan sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan, dan pengakuan anak, ganti nama negara asing, dan kematian;
- 4) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Pelayanan parkir;
- 6) Pelayanan pasar;
- 7) Pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 9) Penggantian biaya cetak peta;
- 10) Pengujian kapal perikanan.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dari jasa umum yang bersangkutan. (Sugianto, 2008:54)

#### **b) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha merupakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh swasta. Prinsip komersial ini meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Kriteria penetapan jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa yang bersifat komersial dan disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai.
- 2) Terdapat harta yang dimiliki/dikuasai daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh daerah.

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha dapat disediakan oleh pemerintah daerah yaitu:

- 1) Pemakaian kekayaan daerah, seperti tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan alat-alat berat, dan alat-alat besar milik daerah;
- 2) Pasar grosir atau pertokoan;
- 3) Tempat pelanggan;
- 4) Terminal;
- 5) Tempat khusus parkir, yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- 6) Tempat penginapan/vila milik daerah;
- 7) Penyodotan kakus;
- 8) Rumah potong hewan;
- 9) Pelayanan pelabuhan kapal;
- 10) Tempat rekreasi dan olahraga;
- 11) Penyebarangan diatas air;
- 12) Pengolahan limbah cair;

13) Penjualan produksi usaha daerah, seperti bibit/benih tanaman, ternak, dan ikan.

Subjek retribusi usaha jasa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut. (Sugianto, 2008: 56)

**c) Retribusi Perizinan Tertentu**

Fungsi perizinan tertentu dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsinya pemerintah daerah masih mengalami kekurangan biaya yang dapat dicukupi dari sumber penerimaan daerah, untuk itu masih perlu dipungut retribusi perizinan tertentu.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perizinan yang termasuk urusan pemerintahan dan diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, antara lain terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- 1) Mendirikan bangunan;
- 2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol;

- 3) Izin gangguan; dan
- 4) Izin trayek.

Subjek dari retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. (Sugianto, 2008: 57)

### **3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan**

Menurut pasal 157 huruf a Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan menurut (Halim, 2004: 68) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut:

- (a) Bagian laba perusahaan milik daerah;
- (b) Bagian laba Lembaga keuangan nonbank;
- (c) Bagian laba atas Penyertaan Modal/Investasi.

### **4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD, Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain dana yang ditetapkan pemerintah. (Suardana, 2018: 892)

Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah yang terdapat pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapataan bunga deposito.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 5) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

**c. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Islam merupakan sejarah ajaran hidup yang lengkap, yang memberikan petunjuk untuk semua aktivitas manusia, termasuk didalamnya ekonomi. Oleh karena itu tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) hidup didunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah bisa menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahan. Tujuan dari Kebijakan fiskal ini dalam Islam yaitu untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan kepentingan material dan spiritual pada tingkat yang setara. Oleh karena itu kebijakan fiskal sangat penting dalam keuangan publik. Kebijakan fiskal sangat penting dalam peranan ekonomi karena sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. (Mufid, 2018: 191)

Pada masa Islam ada beberapa sumber pendapatan atau penerimaan negara yang dibagi kedalam beberapa bagian yaitu:

**1) *Kharraj***

*Kharraj* merupakan pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang mendasari perbedaan antara sistem *Kharraj* dan sistem

PBB adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan *zoning*. Hal ini diartikan bahwa untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanam kurma sedangkan untuk sisi lain ditanam anggur, maka mereka harus membayar jumlah *Kharraj* yang berbeda.

Yang menentukan jumlah besar pembayaran *Kharraj* adalah pemerintah. Untuk menentukan besarnya *Kharraj* dilihat dari tiga hal, yaitu:

- (a) Karakteristik tanah/tingkat keseluruhan tanah;
- (b) Jenis tanaman (termasuk *marketability* dan *quantity*);
- (c) Jenis irigasi

*Kharraj* ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang muslim maupun orang-orang nonmuslim. (Karim, 2011: 257)

## 2) Zakat

Zakat pada masa awal Islam merupakan penerimaan dan pendapatan negara, zakat ini berupa uang tunai, hasil pertanian, dan hasil peternakan zakat merupakan unsur yang sangat penting karena sistem penunainnya yang bersifat wajib, sedangkan tugas negara adalah sebagai '*amil* dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan perimbangan harta diantara sesama masyarakat. Negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara wajib untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya.

Zakat sangat tergolong kecil apabila dibandingkan dengan sistem konvensional. Meskipun demikian, negara Islam tidak berada pada posisi terbebani, karena secara mendasar, sistem zakat telah mengurangi beban negara dari spesifikasi syariat yang ada dalam aturan aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif dan pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial-sosial lainnya. Di lain sisi zakat merupakan ujung tombak dari negara yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan minimal rakyat. (Rahman, 2013: 244)

### 3) *Ghanimah dan Fa'i*

*Ghanimah* merupakan harta yang dirampas dari orang-orang Islam dari tantara kafir dengan jalan perang. Harta yang dirampas ini berupa tanah, tawanan perang, dan harta yang dapat di pindah-pindah (kuda, dirham, pedang, dan lain sebagainya). Sedangkan *Fa'i* merupakan sesuatu yang diambil dari harta orang-orang kafir dan diperoleh tidak dengan pertempuran atau tanpa terjadinya perang.

### 4) *Jiziyah*

*Jiziyah* merupakan pajak tahunan yang wajib dibayar oleh orang kafir, orang merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintah Islam. Kepala negara mempunyai hak untuk membebaskan kewajiban pembayaran *jiziyah* setelah mempelajari situasi dan kondisi yang dialami oleh orang-orang yang dibebani *jiziyah* tersebut. Ada empat golongan yang termasuk membayar *jiziyah* yaitu:

- a) Ahli kitab, yaitu orang-orang yahudi dan Nasrani.
- b) Orang-orang yang memiliki sesuatu yang menyerupai kitab, yaitu orang-orang majusi.
- c) Orang murtad, yaitu orang yang awalnya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam ke agama lainnya.

- d) Orang-orang Nasrani dan bani *taghib* (orang yang tadinya jahiliyyah kemudian masuk Nasrani). (Ridlo, 2013: 9)

Allah telah memerintahkan bahwa masyarakat diwajibkan untuk membayar *jiziyah* dengan patuh. Hal ini dapat dijelaskan dalam Q.S At-Taubah (9): 29) yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiziyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan bahwa setiap umatnya diwajibkan membayar pajak (*jiziyah*) dengan patuh. Hal tersebut ada kaitannya dengan pengoptimalan keuangan publik dikarenakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak merupakan suatu indikator yang sangat dibutuhkan. Apabila masyarakat tidak melanggar dalam membayar pajak maupun zakat maka akan terealisasi penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pengoptimalan dari keuangan publik yang terdistribusi secara merata akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

##### 5) 'Ushr (Bea Cukai)

*‘Usyir* merupakan suatu yang diambil oleh negara dari pada pedagang yang melewati negaranya. *‘Usyr* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri.

Harta yang diambil bea cukainya adalah semua harta yang dibawa pedagang saat dia melewati pemerintah Islam, yaitu sebesar sepersepuluh dari seluruh harta tersebut. (Ridlo, 2013: 10)

## **2. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

(Sadono, 1994: 105) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut, ataukah milik dari wilayah lain. PDRB juga merupakan salah satu Indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam priode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan yang akan datang. (Kairupan, 2013: 2208)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Indikator yang paling banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi suatu daerah. Indikator ini dapat dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS). PDRB merupakan sebagai angka yang secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatannya di suatu

wilayah dimasukkan, tanpa memperhatikan pemilihan faktor-faktor produksi. (Tangkilisan, 2007: 99)

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar PDRB digunakan untuk mengetahui gambaran hasil akhir dari suatu kegiatan perekonomian masyarakat yang dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang merupakan gabungan dari seluruh nilai tambah sektor ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga di definisikan sebagai jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang umumnya dalam kurun waktu satu tahun. PDRB terdiri atas PDRB riil dan PDRB nominal. PDRB riil merupakan PDRB yang dinilai berdasarkan harga konstan. Sedangkan, PDRB nominal yang dinilai berdasarkan harga berlaku. (Suminar, 2019: 51)

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan yaitu bahwa yang dimaksud dengan PDRB adalah keseluruhan nilai tambah bruto yang berasal dari kegiatan ekonomi suatu wilayah tertentu.

## **b. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **1) Metode Langsung**

Metode langsung merupakan metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung ini akan memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Disamping manfaat pemakaian data daerah juga dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Hasil dari penghitungan akan memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah ini, yang menggunakan data bersumber dari daerah yang bersangkutan. Metode langsung ada 3 macam pendekatan, yaitu:

**a) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)**

PDRB merupakan Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokan menjadi 9 sektor lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian;
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) konstruksi
- 5) Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa.

**b) Pendekatan Pengeluaran (*Expendi-ture Approach*)**

PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir seperti:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- 2) Konsumsi pemerintah;
- 3) Pembentukan modal tetap Domestik Bruto;
- 4) Perubahan Stok, dan
- 5) Ekspor Neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

**c) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh Faktor Produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud merupakan suatu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal

dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Regional Bruto, kecuali faktor pendapatan termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung Netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral.

## 2) Metode tidak langsung

Metode tidak langsung disebut juga metode alokasi, yang mana penghitungannya dengan cara menga-lokasikan pendapatan nasional/regional Provinsi untuk tiap Kabupaten/Kotanya dengan menggunakan alokator tertentu. Cara ini ditempuh dikarenakan adanya kerahasiaan dari data tersebut yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang, misalnya data mengenai perbankan dan data tentang pertahanan keamanan. Sektor-sektor yang dihitung dengan menggunakan cara ini, antara lain adalah sektor perbankan dan sektor pemerintahan umum. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas:

- a) Nilai produksi bruto atau netto
- b) Jumlah produksi fisik
- c) Tenaga kerja
- d) Penduduk
- e) Alokator lain yang dianggap cocok untuk daerah tersebut.

Untuk menghitung metode tidak langsung yaitu dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut yang dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing Kabupaten/Kota terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor. Metode tidak langsung ini menggunakan alokator antara lain berupa nilai produk bruto/netto setiap sektor, jumlah produk fisik, tenaga kerja, penduduk dan lainnya yang cocok/sesuai. (Firmansyah, 2012: 6)

**c. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah yang diyakini masih merupakan Indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang di produksi didalam suatu negara dalam satu tahun tertentu. Produksi Barang dan jasa ini bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut akan tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep ilmu ekonomi makro dapat disamakan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Menurut Iragih, (2003) dengan adanya PDRB yang meningkat maka hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dan hal ini sejalan dengan pendapat (Halim, 2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto. (Adriani, 2008: 2)

**3. Konsep Pengeluaran Pemerintah**

**a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya suatu perekonomian yang dilakukan dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun yang ada dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk

daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Zahari, 2017: 186)

## **b. Teori Pengeluaran Pemerintah**

### **1) Teori Rostow dan Musgrave**

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan kedalam beberapa tahap yaitu:

#### **a) Tahap awal**

Pada tahap ini perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

#### **b) Tahap menengah**

Pada tahap menengah ini pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak.

#### **c) Tahap lebih lanjut**

Pada tahap lanjut aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas sosial seperti program

pelayanan kesejahteraan masyarakat kesejahteraan hari tua, dan lain sebagainya. (Ranifial Anugra, 2016: 33)

## 2) Teori Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Menurut Wagner ada beberapa penyebab pengeluaran pemerintah diantaranya yaitu meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut: (Wahyudi, 2018)

$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

PPkP : Pengeluaran Pemerintah Per Kapita

PPK : Pendapatan Per Kapita, yaitu GDP/Jumlah Penduduk

1, 2, n : Jangka Waktu (tahun).

## 3) Teori Peacock dan Wiseman

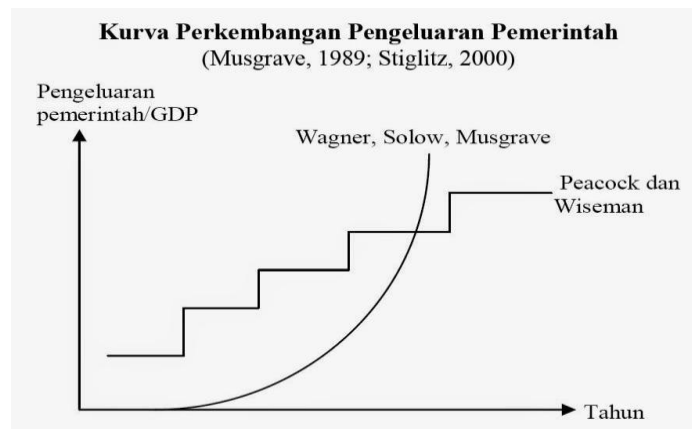
Peacock dan Wiseman merupakan dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori Peacock dan Wiseman ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar.

Teori Peacock dan Wiseman adalah dasar teori pemungutan suara, teori mereka didasarkan pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat mengenai toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya berapa pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Salah satu yang perlu di ingat

dari teori Peacock dan Wiseman yaitu mereka mengemukakan bahwa adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. (Nurhayani, 2012: 10)

Perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat pada diagram.

**Gambar .2.1**  
**Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**



Sumber : Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, 2010

### c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sadono Sukirno (2004) Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan sebuah program yang didalamnya terdapat keterlibatan dari setiap unsur lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam sebuah pembangunan merupakan katalisator dan fasilitator yang membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, yang termasuk didalamnya anggaran belanja dalam rangka agar terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut digunakan sebagian untuk administrasi pembangunan dan sebagian yang lain untuk kegiatan pembangunan yang penting di berbagai jenis infrastruktur. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Aliran penerimaan pemerintah melalui PAD

juga meningkat apabila sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat tercermin dalam kebijakan Pengeluaran pemerintah melalui peningkatan pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang menyediakan barang publik untuk dinikmati oleh orang banyak. Aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Jadi hubungan pengeluaran pemerintah dengan PAD sangat jelas, apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk penyediaan barang publik dan pelayanan publik hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang kemudian membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

#### **4. Hubungan Antara PDRB dan Pengeluaran Pemerintah**

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Menurut Wagner ada beberapa penyebab pengeluaran pemerintah diantaranya yaitu meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatkan fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan. Dan juga Wagner berpendapat bahwa dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. (Mangkoesoberoto, 2010: 169)

Teori Peacock dan Wiseman ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang

semakin besar untuk membiaya pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat sedangkan tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karenanya, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yeni Kuntari pada tahun 2010 di Kabupaten Karanganyar yang berjudul “*Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 Di Kabupaten Karanganyar*”. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi dan satu variabel dependen yaitu penerimaan PAD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu meningkat tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD. Dan secara simultan keseluruhan variabel makro yaitu PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap PAD.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh Hernawati pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “*Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*”. Penelitian ini memiliki tiga variabel independent yaitu PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk dan satu variabel dependen yaitu PAD. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah

Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. dan secara parsial variabel PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD sedangkan Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Tri Wahyuni. NS pada tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu "*Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015)*". Penelitian ini memiliki tiga variabel independent yaitu PDRB, Tingkat Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah dan satu variabel dependen yaitu PAD. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu secara parsial PDRB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung hal ini disebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang mana dalam ekonomi Islam tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara Simultan PDRB, Tingkat Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.
- d) Penelitian yang dilakukan oleh Eni Erviana pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu "*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini memiliki dua variabel independent yaitu Pengeluaran Pemerintah dan PDRB dan satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung hal ini disebabkan karena kurang patuhnya masyarakat dalam membayar

pajak dan retribusi daerah dan ditinjau dari ekonomi Islam hal ini tidak sejalan dengan prinsip ekonomi islam.

- e) sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.
- f) Penelitian lain yang dilakukan oleh Caesar Muslim, Syahrir Mallongi, dan Zainuddin Rahman pada tahun 2019 yang berjudul "*Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari*". Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi, dan memiliki variabel dependen yaitu PAD. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari, Jumlah Penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari dan Inflasi tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD kota Kendari.
- g) Penelitian yang dilakukan oleh Yeny Kurniawati dan Taufik Kurrohman pada tahun 2014 yang berjudul "*Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*". Penelitian ini memiliki variabel independent yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta sedangkan variabel dependen yaitu PAD. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- h) Penelitian yang dilakukan oleh Damitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolasang pada tahun 2018 yang berjudul "*Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PDRB, terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua*". Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

- i) Penelitian yang dilakukan oleh Asdar dan Naidah pada tahun 2017 dengan judul penelitian "*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makasar*". Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan secara simultan variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari beberapa penelitian terdahulu ada perbedaan hasil penelitian seperti menurut hasil penelitian Triani dan Kuntari bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap PAD, sedangkan oleh Yeny Kurniawati dan Taufik Kurrohman PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dan menurut Damitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolasang secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adanya perbedaan dari hasil penelitian disebabkan berbedanya potensi yang dimiliki setiap daerah sehingga peneliti ingin meneliti apakah PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Tanah Datar dan berbeda hasil penelitian dengan peneliti terdahulu.

### **C. Kerangka Pikir**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengoptimalan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah digunakan beberapa Indikator Makro ekonomi diantaranya yaitu PDRB dan Pengeluaran Pemerintah.

PDRB merupakan salah satu Indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam priode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan yang akan datang. Maka dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah maka semakin meningkatnya kegiatan ekonomi daerah dan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

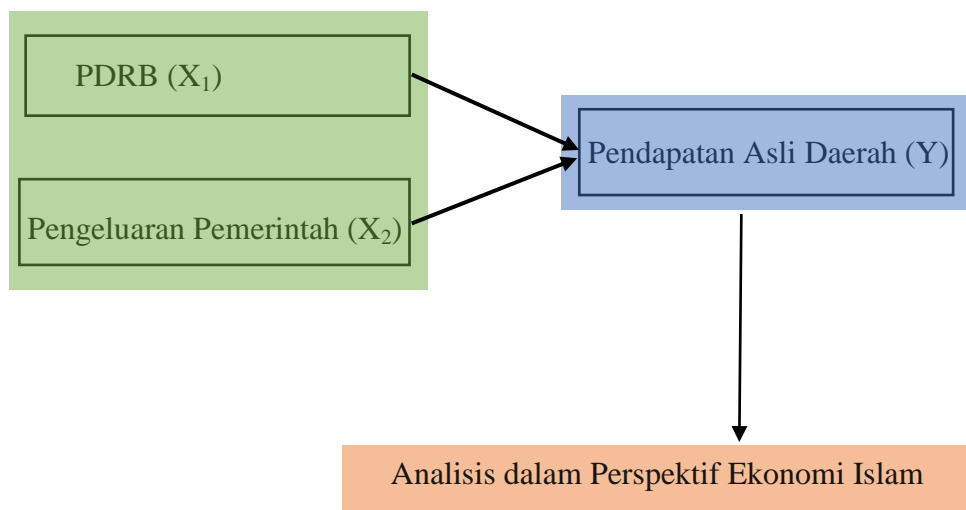
Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan suatu program yang memerlukan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku dan kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan kerana pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator yang menyediakan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang dibutuhkan di daerah. Dengan adanya pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agrerat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Jadi dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Sedangkan dalam pandangan Islam, bahwa anggaran pendapatan negara yaitu digunakan untuk mencapai *falah* (Kesejahteraan/keselamatan) hidup didunia maupun diakhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah bisa menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya. Sehingga penerimaan Negara haruslah di gali secara optimal agar dapat mencukupi kebutuhan Negara dan dapat

didistribusikan secara merata di kalangan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, bahwa penjelasan mengenai hubungan antara variabel diatas, maka ditetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel Y, dan PDRB sebagai variabel  $X_1$  dan Pengeluaran Pemerintah sebagai  $X_2$ . Dalam hal ini variabel PDRB dan Pengeluaran Pemerintah yang akan di uji apakah berpengaruh terhadap variabel PAD menggunakan regresi berganda. Maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 2.2

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan yang belum terbukti yang secara tentatif menerangkan fakta-fakta atau fenomena tertentu dan juga merupakan jawaban yang memungkinkan terhadap suatu pertanyaan riset. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. (Sarwono, 2017: 13)

**a. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2019**

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijelaskan maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen terhadap dependen sebagai berikut:

- a)  $H_01$ : PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2019.
- b)  $H_{a1}$ : PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2019.

**b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010-2019**

Dari penjelasan teori di atas tentang Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a)  $H_02$ : Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2019.
- b)  $H_{a2}$ : Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2019.

**c. Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010-2019 Secara Simultan**

- a)  $H_03$ : PDRB dan Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2019 secara simultan.

- b)  $H_03$ : PDRB dan Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2019 secara simultan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang menekankan pada aspek pengukuran secara objektif. Metode ini disebut juga metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sodik, 2015: 17)

Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Asmendri, 2020: 44). Penelitian ini bertujuan untuk penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi yaitu PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan juga tentang Pendapatan Asli Daerah, yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Waktu peneltian direncanakan pada bulan Januari 2021 sampai Mei 2021.

**Tabel 3.1**  
**Rancangan Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	Waktu Rancangan Penelitian															
	2021															
	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli										
Pengajuan Proposal	■															
Membuat dan Bimbingan Proposal		■														
Seminar Proposal				■												
Bimbingan Setelah seminar					■											
Mengumpulkan dan Menyiapkan data Penelitian									■							
Mengolah Data											■					
Penulisan Skripsi												■				
Bimbingan Skripsi															■	
Sidang Munaqasyah																■

Sumber Data Olahan Excel

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah salah satu hal yang esensial yang perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang tepat guna dan dapat dipercaya untuk daerah atau objek penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang berdasarkan jangka waktu yaitu data laporan realisasi PAD dan pengeluaran pemerintah pertahun selama Kabupaten Tanah Datar berdiri dan data PDRB pertahun yang telah di publikasikan oleh BPS Kabupaten

Tanah Datar, yang diambil menjadi sampel yaitu 10 tahun terakhir dari tahun 2010-2019.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang dilandasi dengan tujuan, kriteria dan pertimbangan tertentu. Dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa tujuan atau maksud yang digunakan sebagai sampel yaitu data realisasi PAD dan data realisasi Pengeluaran Pemerintah pada tahun 2010-2019 serta data PDRB yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel 10 tahun terakhir yaitu 2010-2019.

#### **D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Pajak dan Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Datar yaitu data Total nilai PDRB atas harga konstan, total Pengeluaran Pemerintah dan realisasi Pendapatan Asli daerah yang tersusun dari tahun 2010-2019 berupa data runtut waktu (*time series*) dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, Al-Quran, Al-Hadist dan Internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data secara langsung dari instansi terkait dan studi literatur yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip berbagai teori yang berasal dari buku dan tulisan lain dalam penelitian yang berhubungan dengan objek yang di teliti. Metode ini didukung dengan pengambilan dokumentasi atau data

yang menunjang penelitian tersebut, seperti total PAD Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010-2019, total nilai PDRB atas harga konstan, total pengeluaran pemerintah yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Langkah selanjutnya jika data telah terkumpul yaitu melakukan Analisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yang berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus. (Hadi, 2002: 42)

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan aplikasi pengolah data yang disebut dengan SPSS. Namun juga dijelaskan rumus-rumus pencarian secara manual. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, regresi merupakan teknik statistik (alat analisis) hubungan yang digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain melalui persamaan garis regresi. Analisis regresi biasa berupa garis lurus (linier) dan non linier. Sementara analisis regresi pada penelitian ini adalah regresi linier berganda, yaitu regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X) yaitu PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah dan satu variabel terikat (Y) yaitu PAD.

##### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Asumsi klasik yaitu pengujian dari hipotesis yang digunakan dalam penelitian yang menunjukkan model regresi layak atau tidak untuk pengujian selanjutnya. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menguji kelayakan dari model regresi.

Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrovsmirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

- 1) Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika  $\text{Sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal. (Sujarweni, 2015: 52)

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi di antara variabel bebas. Jika suatu model regresi terdapat gejala multikolinieritas dan dipaksakan untuk digunakan, maka akan memberikan hasil prediksi yang menyimpang.

**c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya

autokorelasi. (Janie, 2012: 30)

### 1) Uji Durbin Watson (DW)

Uji Durbin Watson merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menguji ada tidak autokorelasi dalam regresi linier berganda.

$$d_u < d < 4 - d_u$$

Dimana:

$d$  = Nilai Durbin Watson hitung

$d_u$  = Nilai batas atas/*upper* Durbin Watson tabel

### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain. Jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

### 2. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Lestari, 2017) Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya ( $R^2$ ). Jika determinasi totalnya ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya ( $R^2$ ) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ni, 2017: 1)

### 3. Regresi Linier Berganda

Untuk alat uji Hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). (Usman, 2003: 241)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat, yaitu variabel peningkatan PAD Kabupaten Tanah Datar

X<sub>1</sub> = Variabel PDRB

X<sub>2</sub> = Variabel pengeluaran pemerintah

B<sub>1,2</sub> = Koefisien Regresi

a = Konstanta

e = Error

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji t atau Uji Parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas PDRB atas Harga Konstan, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima
- 2) Jika probabilitas < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak

##### b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS berikut:

- 1) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar**

###### **a. Kondisi Geografis**

###### **1) Posisi Wilayah**

Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai “Luhak Nan Tuo” merupakan salah satu wilayah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi  $00^{\circ}17' \text{ LS} - 00^{\circ}39' \text{ LS}$  dan  $100^{\circ} 19' \text{ BT} - 100^{\circ} 51' \text{ BT}$ , dengan luas wilayah  $1.336 \text{ Km}^2$  atau  $133.600 \text{ Ha}$  dan terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong. Dilihat dari jumlah Nagari yang ada, Kecamatan Sungai Tarab memiliki jumlah nagari terbanyak yaitu sebanyak 10 nagari, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Padang Ganting dan Tanjung Baru sebanyak 2 nagari. Posisi Kabupaten Tanah Datar terletak di antara 3 buah gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Luas daerah Kabupaten Tanah Datar mencapai  $1.336 \text{ Km}^2$  yang hanya sekitar 3,16% dari luas provinsi Sumatera Barat yang mencapai  $42.229,04 \text{ Km}^2$ .

Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas  $204,31 \text{ Km}^2$  atau 15,29% dari luas Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah kecamatan Tanjung Baru dengan luas  $43,15 \text{ Km}^2$  atau sekitar 3,23% dari luas Kabupaten Tanah Datar. Untuk lebih jelasnya luas desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Datar ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2019**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	X Koto	152,02
2	Batipuh	144,26
3	Batipuh Selatan	82,73
4	Pariangan	76,43
5	Rambatan	129,15
6	Lima Kaum	50,00
7	Tanjung Emas	112,05
8	Padang Ganting	83,05
9	Lintau Buo	60,22
10	Lintau Buo Utara	204,31
11	Sungayang	65,45
12	Sungai Tarab	71,85
13	Salimpaung	60,88
14	Tanjung Baru	43,14

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

## 2) Batas Wilayah

Secara administrasi Kabupaten Tanah datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu dengan:

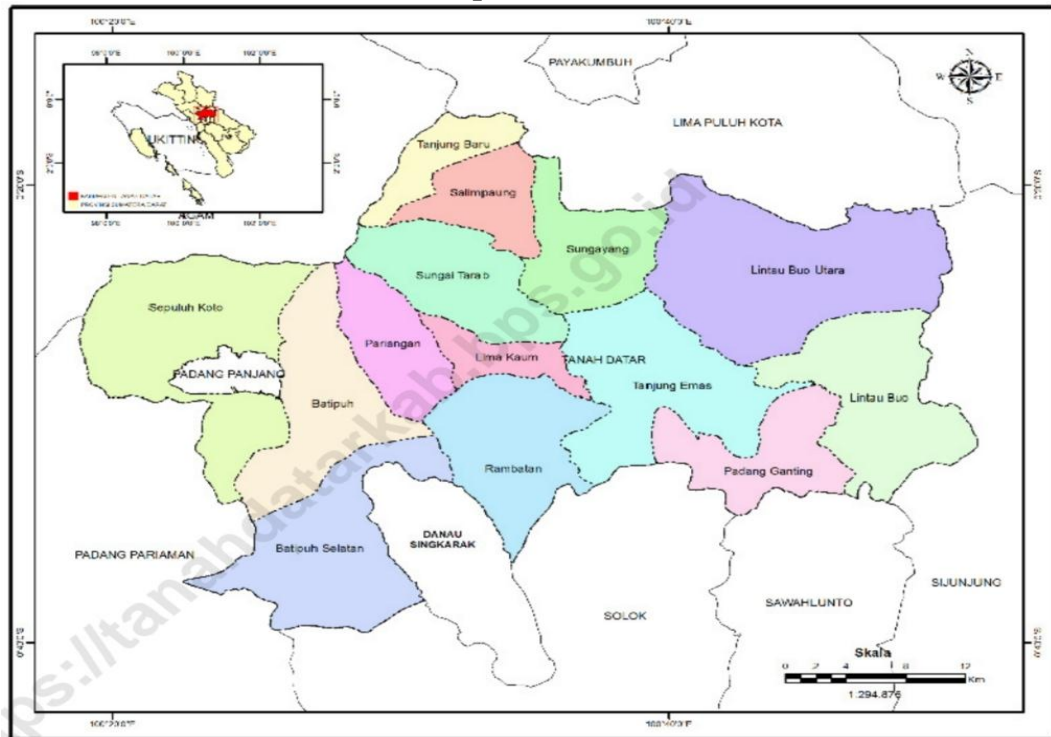
- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Sijunjung.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

## 3) Hidrologi

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 buah sungai.

#### 4) Peta Wilayah

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Tanah Datar**



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

#### **b. Kondisi Demografi**

##### **1) Penduduk**

Penduduk merupakan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, yaitu orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Berikut tabel penduduk menurut jenis kelamin dan kecamatan Kabupaten Tanah Datar:

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan**  
**Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	X Koto	21.634	22.573	44.207
2	Batipuh	14.611	15.504	30.115
3	Batipuh Selatan	5.149	5.515	10.664
4	Pariangan	9.577	10.041	19.618
5	Rambatan	16.313	17.214	33.527
6	Lima Kaum	18.092	19.011	37.103
7	Tanjung Emas	11.052	11.453	22.505
8	Padang Ganting	6.681	7.213	13.894
9	Lintau Buo	9.452	9.458	18.910
10	Lintau Buo Utara	17.930	18.320	36.250
11	Sungayang	8.386	8.908	17.294
12	Sungai Tarab	14.738	15.220	29.958
13	Salimpaung	10.357	10.876	21.233
14	Tanjung Baru	6.300	6.641	12.941

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

Tabel diatas menunjukkan total jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan. Kecamatan Sepuluh Koto memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu sebanyak 44.207 orang, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Batipuh Selatan yaitu sebanyak 10.664 orang.

## 2. Sarana Prasarana

### a. Fasilitas Pendidikan

Produktifitas seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan keterampilan yang dimilikinya dan di ikuti dengan kepercayaan diri yang kuat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar banyak fasilitas Pendidikan dapat dilampirkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar**

Kecamatan	TK	SD	SMP	MTs	SMA	Man	SMK	PT	Total
X Koto	19	34	8	6	4	3	-	-	74
Batipuh	12	28	43	5	1	2	1	-	92
Batipuh Selatan	6	11	3	5	-	4	-	-	29
Pariangan	14	22	4	4	1	2	-	1	47
Rambatan	20	30	6	6	2	2	-	-	66
Lima Kaum	18	29	3	4	3	1	3	1	62
Tanjung Emas	11	18	2	2	1	-	1	-	35
Padang Ganting	9	13	3	1	1	1	-	-	28
Lintau Buo	9	14	6	2	1	1	1	-	34
Lintau Buo Utara	25	36	4	3	1	3	-	-	72
Sungayang	9	14	4	2	1	1	-	-	31
Sungai Tarab	17	26	4	3	2	1	-	-	53
Salimpaung	13	19	3	3	1	1	1	-	41
Tanjuang Baru	11	11	2	2	-	1	1	-	28
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>305</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>653</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

#### **b. Fasilitas Kesehatan**

Dalam rangka mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Tanah Datar maka pemerintah menyediakan beberapa sarana dan prasarana kesehatan untuk memfasilitasi masyarakat untuk kesehatan berobat. Berikut daftar jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah fasilitas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar**

Kecamatan	RS	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	Klinik
X Koto	-	3	6	6	-
Batipuh	-	2	4	8	-
Batipuh Selatan	-	1	2	3	-
Pariangan	-	1	2	5	-
Rambatan	-	2	3	8	-
Lima Kaum	2	2	4	6	-
Tanjung Emas	1	2	3	5	5
Padang Ganting	-	1	2	4	1
Lintau Buo	-	1	2	4	-
Lintau Buo Utara	-	2	4	4	-
Sungayang	-	1	1	4	-
Sungai Tarab	1	3	4	4	1
Salimpaung	-	1	2	4	-
Tanjuang Baru	-	1	2	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>7</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

## B. Hasil Penelitian

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Kolmogorof-Smirnov*, yang syarat untuk uji normalitas yang baik itu adalah apabila residual berdistribusi normal dengan ketentuan nilai signifikan  $> 0,05$ . Berikut hasil dari *Kolmogorov-Smirnov*:

**Tabel 4.5**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7481337348. 68293600
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.125
	Positive	.116
	Negatif	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data olahan spss versi 22

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu sebesar 0.200 yang artinya besar dari 0.05. Hasil uji dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dapat dilihat dengan nilai tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil dari tolerance dan VIF dapat dilampirkan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji Multikolinieritas Tolerance dan VIF Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.962		
PDRB	.401	.44	9.680
Pengeluaran Pemerintah	.011	.44	9.680

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data olahan spss versi 22

Berdasarkan tabel 4.6 diatas nilai tolerance yang dihasilkan yaitu sebesar 0.44 artinya nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0.01, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sedangkan nilai VIF yang dihasilkan yaitu sebesar 9.680 yang artinya kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Jadi dari hasil tolerance dan VIF kesimpulannya yaitu model regresi pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini ditujukan untuk melihat apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Berikut kriteria dalam uji autokorelasi Durbin Watson:

**Tabel 4.7**  
**Kriteria Uji Autokorelasi**

DW	Keputusan
$DW < dL$	Ada autokorelasi positif
$dL < DW < 4 - dU$	Tanpa Kesimpulan/Ragu-ragu
$dU < DW < 4 - dU$	Tidak ada autokorelasi
$4 - dU < DW < 4 - dL$	Tanpa Kesimpulan/Ragu-ragu
$4 - dL < DW < 4$	Ada autokorelasi negatif

**Tabel 4.8**  
**Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 <sup>a</sup>	.956	.944	8483039185. 198	2.927

a. Predictors: (Constant), PENGELUARAN PEMERINTAH, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: data olahan SPSS versi 22

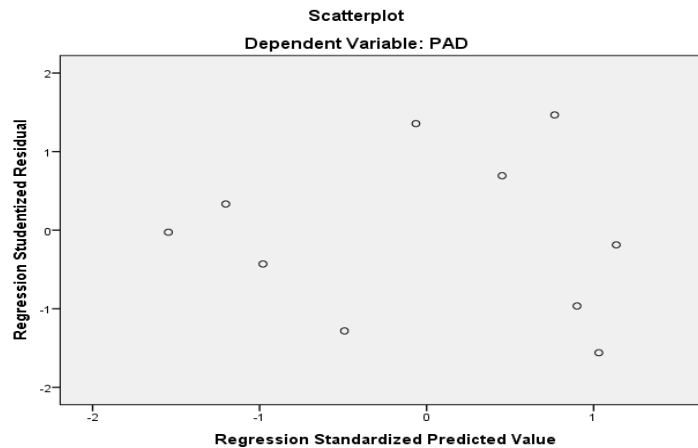
Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dikatakan bahwa uji autokorelasi Durbin-Watson yang dihasilkan yaitu tidak ada autokorelasi. Hasil dari uji Durbin-Watson menunjukkan nilai 2.927 dengan jumlah variabel sebanyak 2 dan (n) 10 maka di peroleh hasil dU yaitu 1.6413 dan hasil dL yaitu sebesar 0.6972 (hasil dU dan dL diperoleh dari tabel Durbin-Watson). Kemudian hasil dari 4-dU diperoleh 2.3587 dan hasil dari 4-dL yaitu sebesar 3.3028. oleh sebab itu  $4 - dU < DW < 4 - dL$  ( $2.3587 < 2.927 < 3.3028$ ) maka dapat ditarik kesimpulan yaitu tanpa kesimpulan.

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya yaitu apabila titik-titik dalam grafik

menyebar diatas dan dibawah sumbu angka nol pada sumbu Y. berikut hasil dari uji heteroskedastisitas:

**Gambar 4.2**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data olahan SPSS 22

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan kriteria diatas bahwa titik-titik dalam grafik menyebar diatas dan dibawah sumbu nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel terikat terhadap variabel bebas. Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, maka garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh.

**Tabel 4.9**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 <sup>a</sup>	.956	.944	8483039185. 198	2.927

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: data olahan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 4.9 diatas nilai R sebesar 0.978 dan nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0.956 atau 95.6%. besarnya nilai koefisien determinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri atas PDRB (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 95.6%. sedangkan sisanya sebesar 4.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.10**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	1949180216.202	39887320208.170		.049
PDRB	-9782.340	10943.176	-.337	-.894
Pengeluaran Pemerintah	.166	.048	1.305	3.463

Sumber: Data olahan SPSS versi 2.2

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diformulasikan persamaan regresi linier berganda dari variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 1949180216.202 + (-9782.340X_1) + 0.115X_2$$

Dimana:

$$a = \text{Konstanta } 1949180216.202 \quad b_1 = -9782.340$$

$$X_1 = \text{PDRB} \quad b_2 = 0.166$$

$$X_2 = \text{Pengeluaran Pemerintah}$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan persamaan dari regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 1949180216.202 menyatakan bahwa jika PDRB dan Pengeluaran Pemerintah dianggap sama dengan nol maka besarnya rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 1949180216.202
- b) Berdasarkan persamaan dari regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi PDRB sebesar -9782.340, yang artinya jika PDRB mengalami kenaikan 1%, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 9782.340%.
- c) Berdasarkan persamaan dari regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.166, artinya Pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1%, dan koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan yang searah antara Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu apabila nilai Pengeluaran Pemerintah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat.

#### **4. Hasil Uji Hipotesis**

##### **a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)**

Uji koefisien regresi secara parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk nilai signifikansinya apabila signifikansinya  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan signifikansinya  $< 0.05$  Maka  $H_0$  ditolak. Sebelum diketahui bahwa hasil uji hipotesis diterima atau ditolak, maka terlebih dahulu tentukan  $T_{tabel}$  dengan signifikansi 5% (0.05) dengan uji satu arah dan derajat keabsahan  $df = n - k - 1$  atau  $df = 10 - 2 - 1 = 7$  diperoleh  $T_{tabel}$  sebesar 1.89458. Hasil uji secara parsial untuk PDRB dan Pengeluaran Pemerintah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19491802 16.202	39887320 208.170		.049	.962
PDRB	-9782.340	10943.176	-.337	-.894	.461
Pengeluaran Pemerintah	.166	.048	1.305	3.463	.011

Sumber: Data olahan SPSS versi 2.2

Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (uji T) pada variabel PDRB menghasilkan  $T_{hitung}$  sebesar 0.894 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 1.89458 yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$  ( $0.894 < 1.89458$ ) serta di dapat nilai signifikansi sebesar  $0.461 > 0.05$ , maka  $H_{01}$  diterima, dan  $H_{a1}$  ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan pada Pengeluaran Pemerintah hasil uji signifikansi menghasilkan  $T_{hitung}$  sebesar 3.463 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 1.89458 yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$  ( $3.463 > 1.89458$ ) serta didapat nilai signifikansi sebesar  $0.011 < 0.05$ , maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima yang berarti Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2010-2019.

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji signifikansi simultan (uji F) yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independent terhadap variabel dependent. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dengan hasil

uji satu arah dengan derajat keabsahan  $df = k (n - 1)$  F (2.9) atau dapat diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 4.256.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji F untuk PDRB dan Pengeluaran Pemerintah**  
**terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1099604332 5322459000 000.000	2	5498021662 6612290000 00.000	76.402	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5037336767 2318570000 0.000		7		
	Total	1149977700 2045646000 000.000	9			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, PDRB

Sumber: Data olahan SPSS 22

Berdasarkan hasil uji F diperoleh untuk  $F_{hitung}$  sebesar 76.144 dan diketahui  $f_{tabel}$  sebesar 4.256  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $76.402 > 4.256$ ) dengan signifikansi yang diperoleh sebesar 0.000 atau kurang dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) maka dalam hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### C. Pembahasan Penelitian

#### 1. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2010-2019

Berdasarkan Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (uji T) pada variabel PDRB menghasilkan  $T_{hitung}$  sebesar -0.894 dengan  $T_{tabel}$

sebesar 1.89458 yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$  ( $-0.894 < 1.89458$ ) serta di dapat nilai signifikansi sebesar  $0.461 > 0.05$ , maka  $H_01$  diterima, dan  $H_{a1}$  ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali terjadi pada penelitian, karena hasil penelitian juga diperlihatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Damitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolasang pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PDRB, terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua tahun 2007-2016” yang secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2010-2019**

Berdasarkan uji parsial (uji T) pada Pengeluaran Pemerintah hasil uji signifikansi menghasilkan  $T_{hitung}$  sebesar 3.463 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 1.89458 yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$  ( $3.463 > 1.89458$ ) serta didapat nilai signifikansi sebesar  $0.011 < 0.05$ , maka  $H_02$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima yang berarti Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2010-2019.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asdar dan Naidah pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli di Daerah (PAD) Kota Makasar”. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang telah dijelaskan bahwa hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah sudah sangat jelas, apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk menyediakan kebutuhan akan barang publik maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Apabila kegiatan

ekonomi meningkat maka pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi daerah yang akan memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah.

### **3. Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2010-2019 Secara Simultan**

Berdasarkan hasil uji F diperoleh untuk  $F_{hitung}$  sebesar 76.144 dan diketahui  $f_{tabel}$  sebesar 4.256  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $76.402 > 4.256$ ) dengan signifikansi yang diperoleh sebesar 0.000 atau kurang dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) maka dalam hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernawati pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **4. Peranan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2010-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan untuk peranan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2019 dalam perspektif ekonomi Islam sudah sejalan dengan ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Pajak Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>Persentase</b>
2010	3.923.500.000	4.633.265.000	118
2011	5.108.456.000	5.438.175.000	106
2012	6.084.734.000	7.293.770.000	120
2013	8.774.156.000	8.174.666.000	93
2014	12.187.541.000	9.458.236.000	78
2015	11.296.125.000	10.872.909.000	96
2016	12.379.061.000	11.771.072.000	95
2017	14.624.911.000	16.523.394.000	113
2018	19.203.329.000	19.847.312.000	103
2019	22.514.797.000	19.578.757.000	87

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2010-2019

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Pajak Daerah**

<b>Target Retribusi</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Retribusi dalam persen</b>	<b>PAD</b>
3.812.000.000	3.059.931.000	80	36.941.724.000
5.096.749.000	3.298.152.000	65	51.552.513.000
5.678.275.000	4.978.111.000	88	53.691.048.000
7.244.673.000	6.893.525.000	95	63.835.093.000
11.719.184.000	11.639.780.000	99	99.694.236.000
7.225.000.000	8.578.763.000	119	112.072.727.000
8.009.619.000	8.035.472.000	100	118.971.144.000
7.137.463.000	6.867.932.000	96	129.271.309.000
9.916.242.000	9.163.333.000	92	115.914.187.000
12.679.114.000	8.608.497.000	68	129.785.828.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang mana ini telah sesuai dengan ekonomi islam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْ  
 يَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiziyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan bahwa setiap umatnya diwajibkan membayar pajak (*jiziyah*) dengan patuh. Hal tersebut ada kaitannya dengan pengoptimalan keuangan publik dikarenakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak merupakan suatu indikator yang sangat dibutuhkan. Apabila masyarakat tidak melanggar dalam membayar pajak maupun zakat maka akan terealisasi penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pengoptimalan dari keuangan publik yang terdistribusi secara merata akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2010-2019, sebagaimana telah dijelaskan pada hasil sebelumnya dan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pengaruh PDRB yang diperoleh lebih besar dari 0.05 yaitu - 0.894 ( $0.461 > 0.05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Hasil dari pengaruh pengeluaran pemerintah yaitu lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.011 ( $0.011 < 0.05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar.
3. Hasil dari pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah yaitu kecil dari 0.05 yaitu ( $0.000 < 0.005$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar.
4. Peranan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari pajak dan retribusi daerah telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam hal ini dilihat dari realisasi pajak dan retribusi daerah sudah mencapai target yang ditetapkan.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah daerah yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD terutama melalui kebijakan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah agar masyarakat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagi akademis dan peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini

sebagai bahan referensi untuk kegiatan mengajar dan juga penelitian selanjutnya. Dikarenakan dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 10 tahun dan juga mampu menambah variabel independennya.

3. Bagi publik, dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan konsisten dalam membayar pajak dan retribusi daerah karena hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 29. Dengan hal tersebut telah memberikan umpan balik sendiri kepada masyarakat, karena dengan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah akan memberikan dampak terhadap masyarakat yaitu dengan adanya penyediaan dari barang publik. Meskipun dikatakan Indonesia bukanlah negara Islam tetapi kewajiban dari membayar pajak merupakan sebuah peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Sani Alhusain, A. T. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adriani, E. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2.
- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 207.
- Asmendri, M. S. (2020). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 44.
- Djumadi. (2016). Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam. *Tahkim*, 8.
- Firmansyah, T. w. (2012). Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar.
- Hadi, S. (2002). *Metode Research*. Yogyakarta: ANDI.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Banjarmasin: Deepublish.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iryanie, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Kairupan, S. P. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA*, 2208.
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004. *SIGN Jurnal Hukum*, 22.
- Karim, A. (2011). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuntari, T. d. (2007). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar. *STIE*.
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 23.
- Mangkoesoberoto, G. (2010). *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF.

- Mufid. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ni, L. L. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Integritas dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi . *E-Jurnal Akuntansi*, 1.
- Nurhayani. (2012). Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10.
- Nurul Huda, H. R. (2009). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Prasetya, F. (2012). *Ekonomi Publik: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Malang: Unibraw.
- Rahman, F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqthisad*, 244.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Jurnal Al-Qanun*, 444.
- Ranifial Anugra, T. M. (2016). Analisis hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 33.
- Ridlo, A. (2013). Kebijakan Ekonomi Umar IBN Khatab. *Jurnal Al-'Adl*, 9.
- Sarwono, J. (2017). *Mengenal Prosedur-Prosedur Populer dalam SPSS 23*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sembiring, A. I. (2019). *Perekonomian Indonesia Anatara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintah Daerah*. Bandung: Wahana Resolusi.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suardana, N. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 892.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS untuk Peneltian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Suminar, W. D. (2019). *Ekonomi Wilayah untuk Perencanaan Tata Ruang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grafindo.

- Tumangkeng, S. (2018). Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 128.
- Udin, R. (2012). Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Eksos*, 105-113.
- Usman, H. d. (2003). *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyudi. (2018). Dampak Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Prosiding SATIESP*, 146.
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusta dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemeritah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Economics and Business*, 186.
- Zein, Aliman Syahuri. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemeritah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Keislaman*, 2.